



EVALUASI AKUNTABILITAS PANTI ASUHAN 'SR' DI SURABAYA

Oleh

Nico Timothy^{1*}, Yenny Sugiarti²

Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya, Indonesia

e-mail: nico.timothy14@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas yang ada di panti asuhan SR dan bagaimana kesesuaiannya dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa panti asuhan SR telah menerapkan kelima dimensi akuntabilitas yaitu transparansi, pertanggung jawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas dengan baik serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Panti asuhan SR juga telah menerapkan akuntabilitas horizontal dan vertikal dengan baik dengan memberi laporan pertanggungjawabannya kepada yayasan, sementara kepada donatur diberikan bukti kwitansi tetapi apabila donatur meminta laporan pertanggungjawaban atas donasinya maka akan diberikan juga.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Transparansi*

PENDAHULUAN

Panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah suatu lembaga nirlaba dimana lembaga ini bertujuan menampung, merawat, dan mendidik anak yatim ataupun yatim piatu. Untuk mencapai tujuan tersebut suatu lembaga pasti memerlukan dana untuk melakukan kegiatan sehari – harinya untuk anak – anak yang mereka rawat. Dana yang di dapat oleh panti asuhan bisa di dapat dari institusi seperti sekolah, perusahaan, yayasan maupun dari perorangan yang tergerak hatinya untuk membantu, nantinya dana ini harus dibuat menjadi suatu laporan keuangan panti asuhan, dan hal ini sudah diatur dalam PSAK 45 mengenai laporan keuangan. Menurut PSAK Nomor 45 laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas tersebut. Hal ini sudah diwajibkan karena donatur yang tetap seperti perusahaan atau sekolah ingin mengetahui bagaimana dana bantuan mereka digunakan,

apakah sudah benar – benar digunakan dengan benar untuk keperluan panti asuhan atau digunakan untuk kebutuhan pribadi pengurus yayasan.

Penelitian ini termasuk *explanatory research* karena bertujuan untuk menjelaskan praktik akuntabilitas yang saat ini diterapkan, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, serta dampak dari praktik tersebut. Penelitian ini akan menjelaskan apakah pengelolaan keuangan telah dilakukan secara akuntabel. Penelitian ini juga akan menjelaskan bentuk akuntabilitas yang sesuai untuk diterapkan di panti asuhan SR.

Kristian (2015) melakukan penelitian Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik terhadap beberapa organisasi publik antara lain PDAM Tirtawening, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Perhutani, BKSDA, dan Bandung *Culinary Night*. Di dalam penelitian tersebut Kristian menyampaikan bahwa organisasi sektor publik pada umumnya belum mampu menunjukkan penerapan akuntabilitas secara optimal. Hasil penelitian



Yuliarti (2014), juga menjelaskan bahwa laporan keuangan Yayasan Panti Asuhan Yabappenatim Jember belum lengkap dalam pelaksanaan akuntabilitas horizontal. Dalam penelitian Sofyani, Pratolo, dan Saleh (2021) yang dilakukan pada pemerintah desa diketahui bahwa transparansi yang diterapkan sudah cukup baik. Penelitian Chu dan Luke (2021) pada organisasi non-pemerintah menemukan bahwa akuntabilitas vertikal dan horizontal telah diterapkan dengan baik. Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013) dalam Kristian (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas sektor publik perlu untuk dengan cara membaginya menjadi lima dimensi yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas.

Berdasarkan hal yang telah saya uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengevaluasi akuntabilitas di panti asuhan berdasarkan kesesuaian akuntabilitas sektor publik. Menurut (Adisasmita, 2011) akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja atau tindakan seseorang, badan hukum, dan badan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Menurut (Mursyidi, 2013) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada suatu entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2013) akuntabilitas dapat dibagi ke dalam 2 jenis yaitu akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada atasan maupun bawahan dan horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada pihak yang tidak memiliki hubungan atasan atau bawahan dalam organisasi. Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013) membagi akuntabilitas sektor publik menjadi lima dimensi yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Pertama transparansi yang kemudahan akses untuk mendapat informasi yang kita perlukan mengenai suatu

organisasi. Kedua pertanggungjawaban, pertanggungjawaban ditujukan kepada seseorang atau suatu organisasi bertanggung jawab atas aktivitas ataupun kinerjanya, serta memberikan hukuman terhadap tindakan yang salah dan memberikan apresiasi atau hadiah terhadap suatu tindakan yang baik. Ketiga pengendalian, dalam dimensi ini pemangku kepentingan dapat memastikan apakah organisasi publik telah berhasil mencapai misinya apakah belum, apakah organisasi tersebut sudah pada jalur yang tepat dalam mencapai misinya. Keempat tanggung jawab, tanggung jawab berbeda arti dengan dimensi pertanggungjawaban, dalam dimensi ini membahas bahwa suatu organisasi sebaiknya dibatasi oleh hukum dan aturan, terutama dalam organisasi publik hukum dan aturan sangat berguna karena dapat menjadi pengikat aktivitas yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kelima responsivitas yang merupakan salah satu yang terpenting karena dalam dimensi ini mengatakan bahwa suatu organisasi sebaiknya berupaya untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan, harapan tersebut berupa permintaan dan kebutuhan.

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan akuntabilitas sektor publik di masa depan agar dimensi sektor publik ini diketahui penerapannya dalam masing – masing organisasi sektor publik, tidak hanya secara keseluruhan karena setiap organisasi memiliki bentuk yang berbeda dan dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi atau panduan.

Untuk menjawab pertanyaan utama peneliti juga melengkapinya dengan beberapa pertanyaan (*mini research question*) antara lain:

1. Bagaimana akuntabilitas di panti asuhan selama ini?
2. Bagaimana kesesuaian dari penerapan akuntabilitas yang dilakukan saat ini dengan akuntabilitas sektor publik?



.....
Bagaimana dampak dari penerapan akuntabilitas yang dilakukan saat ini?

METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang meliputi jenis data yang diambil dan teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan agar lebih mengetahui secara langsung objek yang akan diteliti secara mendalam melalui cara wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah semi structured dimana metode ini merupakan proses wawancara dimana panduannya berasal dari pengembangan topik dan pengajuan pertanyaan, dengan menggunakan metode semi structured wawancara yang akan dilakukan akan dilakukan secara lebih rileks dan santai. Metode observasi peneliti akan menggunakan metode non partisipasi dimana dalam metode ini peneliti tidak termasuk dalam kelompok yang diteliti. Dalam observasi ini peneliti akan melakukan observasi terhadap penyusunan laporan keuangan, pembuatan tanda terima, dan fasilitas panti asuhan . Analisis dokumen peneliti akan melakukan analisis terhadap dokumen laporan keuangan, dokumen voucher, dokumen daftar tamu, dokumen tanda terima, dan website.

Pada triangulasi peneliti akan menggunakan validitas data dalam pengumpulan data, peneliti akan melakukan wawancara menggunakan metode semi-structured dengan tujuan agar wawancara dapat dilakukan secara rileks dan santai namun tetap fokus. Agar mendapat data yang dapat dikatakan valid, peneliti akan membandingkan data wawancara yang berasal dari minimal dua sumber yang berbeda jabatan antara lain 1 orang bagian tata usaha/pembukuan, kandidat pimpinan panti asuhan dan 1 orang donatur. Selain itu peneliti juga akan membandingkan hasil wawancara dengan observasi aktivitas

yang ada seperti penyusunan laporan keuangan, pembuatan tanda terima donasi, juga fasilitas yang tersedia di panti asuhan, kemudian peneliti juga akan membandingkan dengan analisis dokumen yang berkaitan dengan wawancara dan observasi yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kecocokan atau kekonsistenan hasil pengumpulan data dari teknik pengumpulan data yang berbeda. Reliabilitas data, untuk memperoleh data yang reliabilitas peneliti akan merekam seluruh wawancara yang akan dilakukan dengan seizin pihak panti asuhan dan mendokumentasikan dokumen – dokumen panti asuhan SR yang akan dianalisis dengan tujuan tidak melewatkan setiap hasil pengumpulan data agar data yang disajikan dalam penulisan ini reliable. Pada akhirnya informasi yang diperoleh akan diolah berdasarkan teori yang telah dijabarkan pada bab II agar data yang disajikan dapat sesuai dan dapat diandalkan. Narasumber dalam wawancara, aktivitas dan fasilitas yang diobservasi dan dokumen yang dianalisis hanya yang relevan dan terkait dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui hasil pengumpulan data yang telah dilakukan peneliti mendapat penemuan antara lain panti asuhan telah menerapkan pada akuntabilitas vertikal seperti adanya struktur organisasi yang berfungsi dengan benar sesuai dengan job description, membayar pajak tepat waktu, menggunakan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh yayasan, adanya evaluasi setiap akhir bulan membahas mengenai kinerja karyawan, kegiatan yang telah berjalan, kemudian memberikan pendidikan, makanan, pakaian, dan kelengkapan identitas anak. Akuntabilitas Horizontal, panti asuhan juga memberikan pertanggungjawaban berupa pemberian bukti kwitansi kepada donatur, selain itu juga diberikan laporan pertanggung jawaban atas donasi apabila donatur meminta, memberikan



pendidikan, pakaian, makanan, dan kelengkapan akte, membuat laporan keuangan sesuai dengan format PSAK 45 dan juga dilakukan audit.

Panti asuhan juga telah menerapkan kelima dimensi akuntabilitas menurut Aman, Al-Shbail, dan Mohammed dengan baik. Pertama transparansi, panti asuhan menerapkan beberapa hal sebagai penerapan transparansi seperti terdapat website, terdapat mading informasi tentang panti asuhan, terdapat mading tentang jadwal masuk pekerja, kegiatan yang akan datang, anjuran cuci tangan, tips dalam mengasuh anak, dan terdapat pelaporan keuangan setiap bulan. Kedua pertanggungjawaban, dalam panti asuhan penerapannya dilakukan melalui membuat akte lahir, menyekolahkan anak – anak, membantu membuat KIS, terdapat surat perjanjian yang ditandatangani pekerja terkait SOP, bekerja sesuai anggaran, dan setiap terjadi transaksi harus di bubuhi nama atau tanda tangan pekerja yang melakukan. Ketiga pengendalian, di panti asuhan pengendalian juga telah diterapkan dengan rapi dan ketat dengan melakukan pemisahan jabatan dan fungsi, terdapat evaluasi setiap akhir bulan atau setiap triwulan, memasang CCTV, menyertakan salinan kwitansi pada laporan keuangan, melakukan audit oleh yayasan, melakukan arsip salinan kwitansi, dan untuk rekening panti asuhan tidak boleh di atas nama kan pribadi. Keempat tanggung jawab, panti asuhan telah menjalankan panti asuhan sesuai dengan peraturan pemerintah, implementasi pada panti asuhan antara lain syarat penerimaan anak asuh di panti asuhan sesuai dengan peraturan menteri sosial, melakukan evaluasi tiap bulan atau triwulan, jenis pendanaan yang diterima oleh panti asuhan didapat dari donatur, melengkapi biodata, latar belakang anak asuh, dan tumbuh kembang seluruh anak asuh. Kelima dimensi responsivitas, pada panti asuhan implementasi yang dapat diketahui antara lain memberikan pendidikan kepada anak – anak, menyediakan bidan bagi ibu

hamil, menyediakan obat – obatan jika anak sakit, dan pemenuhan permintaan yayasan yaitu pelaporan setiap bulannya.

Karena panti asuhan telah menerapkan kelima dimensi akuntabilitas dengan optimal mereka juga mendapat dampak dari penerapan tersebut antara lain mendapat kepercayaan dari masyarakat, dampak ini tidak di dapat panti asuhan secara kebetulan merupakan hasil dari penerapan akuntabilitas transparansi dan akuntabilitas pertanggung jawaban terutama dalam tanggung jawab mengelola keuangan melalui laporan keuangan bulanan. Dampak selanjutnya yaitu mengurangi tindak kecurangan, hal tersebut didukung oleh pernyataan bagian pembukuan panti asuhan yang menceritakan bahwa selama tujuh tahun bekerja di panti asuhan belum pernah ada tindak kecurangan yang terjadi, hal itu merupakan keberhasilan panti asuhan dalam menerapkan akuntabilitas pengendalian berdampak pada minimnya tindak kecurangan di panti asuhan dan juga bisa berdampak pada rasa percaya yang di dapat panti asuhan. Karena panti asuhan merupakan organisasi yang memiliki layanan adopsi maka diperlukan pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung, kemudian panti asuhan juga memerlukan pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan yang menudukung untuk menjadi bidan bagi ibu hamil yang ada di panti asuhan, hal ini tentunya membuat panti asuhan juga membuka lapangan pekerjaan dan membantu mengurangi jumlah pengangguran, hal ini merupakan dampak dari penerapan akuntabilitas responsivitas dengan baik.

Diskusi

Terdapat persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada panti asuhan SR jika dibandingkan dengan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya, antara lain :

Menurut Mahmudi (2013) akuntabilitas vertikal dapat dibagi menjadi lima yaitu



manajerial, program kebijakan, dan keuangan. Akuntabilitas manajerial pada panti asuhan SR telah diterapkan secara optimal dengan membuat struktur organisasi yang jelas, kemudian jabatan – jabatan yang berfokus pada satu hal agar tidak ada tumpang tindih dalam mengemban tugas yang akhirnya kegiatan di panti asuhan tidak berjalan dengan lancar, hal tersebut sesuai dengan penjelasan Mahmudi (2013) mengenai akuntabilitas manajerial yaitu pertanggung jawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien serta bagaimana respon organisasi terhadap pelayanan publik.

Akuntabilitas program pada panti asuhan SR juga telah diterapkan dengan optimal yaitu dengan melakukan evaluasi setiap akhir bulan atau setiap triwulan untuk membahas bagaimana kinerja pekerja selama bulan berjalan, bagaimana kegiatan yang telah dijalankan, seberapa banyak dana yang telah digunakan, dan seberapa banyak dana yang dibutuhkan untuk bulan – bulan selanjutnya, hal ini sesuai dengan penjelasan Mahmudi (2013) yaitu akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah organisasi telah memikirkan program alternatif yang dapat memberikan hasil yang optimal tetapi dengan biaya yang minim.

Akuntabilitas kebijakan juga telah diterapkan dengan optimal yaitu dengan menerima pelamar kerja yang benar – benar memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan yang diinginkan, contohnya bagian adopsi tentu yang harus memiliki latar belakang pendidikan pekerja sosial dan memiliki kualifikasi untuk bekerja dalam bidang pelayanan anak agar saat ada proses adopsi panti asuhan tidak menyalahi peraturan yang berlaku, kemudian menyediakan bidan bagi ibu hamil agar saat ada keluhan secara tiba – tiba bidan dapat melakukan pemeriksaan dahulu. Artinya kebijakan panti asuhan SR sesuai dengan penjelasan Mahmudi (2013) yaitu dengan pertanggungjawaban lembaga publik

atas kebijakan – kebijakan yang diambil, dan mempertimbangkan kebijakan yang diambil dengan resiko di masa depan.

Akuntabilitas keuangan juga telah diterapkan secara optimal dengan adanya anggaran keuangan yang berfungsi agar saat panti asuhan menerima dana dari donatur dapat langsung digunakan sesuai dengan kebutuhan yang sesuai, selain itu panti asuhan SR juga melakukan evaluasi terhadap penggunaan keuangan mereka agar seluruh pekerja di panti asuhan SR mengetahui bagaimana penggunaan dana pada bulan – bulan yang telah dijalani, sebagai contoh dana digunakan untuk membeli sandal untuk anak – anak, membayar perawatan ibu hamil, untuk membeli makanan yang sehat untuk anak – anak. Artinya temuan tersebut sesuai dengan penjelasan Mahmudi (2013) yaitu pertanggungjawaban lembaga sosial dalam menggunakan uang publik secara efektif, efisien, tidak boros, dan tidak terjadi korupsi.

Panti asuhan juga rutin membayarkan pajaknya, hanya untuk pembayaran dilakukan oleh yayasan karena NPWP panti asuhan menjadi satu dengan NPWP yayasan, tetapi untuk kendaraan yang digunakan oleh panti asuhan pajaknya dibayarkan langsung oleh pihak panti asuhan, selain itu panti asuhan juga selalu memperbaharui izin – izin yang diperlukan seperti izin pendirian atau izin bangunan, kemudian dilakukan akreditasi, dan panti asuhan terbuka terhadap kunjungan dinas sosial. Artinya panti asuhan juga telah optimal dalam bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan dinas sosial sebagaimana disampaikan oleh Mahmudi (2013) yaitu akuntabilitas vertikal adalah jenis akuntabilitas yang memberi tanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi, otoritas lebih tinggi seperti misalnya kepada pemerintah, bupati atau walikota, CEO perusahaan, yayasan, dan lain lain

Jenis akuntabilitas yang kedua yaitu akuntabilitas horizontal, panti asuhan juga telah menerapkannya secara optimal contohnya memberikan bukti kwitansi terhadap donatur,



kemudian apabila donatur ingin mendapat laporan pertanggung jawaban atas donasi nya maka panti asuhan juga akan memberikan. Pertanggung jawaban juga diberikan kepada anak asuh dan ibu hamil, kepada anak asuh panti asuhan memberikan pendidikan, kelengkapan identitas, makanan, dan pakaian yang layak, sementara kepada ibu hamil panti asuhan menyediakan bidan untuk merawat ibu hamil ketika ada keluhan. Hal – hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas horizontal sudah sesuai dengan penjelasan Mahmudi (2013) yaitu akuntabilitas horizontal adalah jenis akuntabilitas yang memberi tanggung jawab kepada sosial atau terhadap lembaga lain yang tidak memiliki hubungan atasan dengan bawahan, selain itu juga telah sesuai dengan aturan Menteri Sosial mengenai fungsi pelaksanaan pengasuhan anak. Pada penelitian Chu dan Luke diketahui bahwa organisasi non-pemerintah menerapkan strategi ‘bekerja dengan’ donatur untuk mendapat sinergi yang sejati daripada ‘bekerja di sekitar’ persyaratan donatur, dan penerapan strategi ini secara efektif sejajar ke atas, ke dalam, dan ke bawah. Dalam temuan tersebut juga di dapati pergeseran arah dalam akuntabilitas organisasi non-pemerintah yaitu dengan berfokus pada pendekatan yang selaras dengan donatur dan memfasilitasi peran aktif untuk penerima manfaat. Hal tersebut artinya organisasai non-pemerintah telah menerapkan akuntabilitas vertikal dengann baik dan organisasi non-pemerintah juga menyadari bahwa akuntabilitas horizontal juga penting dan mereka pun melakukan pergeseran kea rah korizontal untuk menjaga donatur mereka dan pihak – pihak yang bekerjasama.

Pada panti asuhan juga dilakukan audit secara rutin dari yayasan terhadap keuangan, pelayanan, dan kinerja karyawan agar tidak melenceng dari visi dan misi, kemudian untuk pelaporan keuangan panti asuhan juga telah menyusun sesuai dengan aturan PSAK 45. Artinya panti asuhan telah sesuai dengan

peraturan pemerintah terkait format laporan keuangan organisasi sosial.

Pada penelitian terhadap panti asuhan SR dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi telah dilakukan cukup optimal, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya informasi yang disediakan oleh panti asuhan melalui mading, selebaran, website yayasan, maupun melalui penjelasan yang di dapat donatur ketika berdonasi. Temuan ini sesuai dengan kata kunci yang dijelaskan oleh Aman yaitu bahwa sebuah organisasi mengungkapkan fakta – fakta tentang kinerjanya. Temuan tidak sesuai dengan hasil penelitian Yuliarti (2014) dimana pada panti asuhan obyek penelitiannya tidak terdapat penjelasan tentang pelayanan yang dilakukan, walaupun mereka tetap terbuka dalam hal pengelolaan dana dengan menyebarkan proposal melalui petugas atau pekerja yang ditunjuk, dan mereka tetap membuat laporan keuangan bulanan walaupun komponen – komponen di dalamnya tidak lengkap karena keterbatasan dana dan SDM. Dengan temuan tersebut disimpulkan penerapan dimensi transparansi pada objek penelitian Yuliarti (2014) tidak berjalan dengan optimal. Hasil temuan ini juga tidak sesuai dengan hasil temuan penelitian Kristian (2013) yang menyatakan bahwa di organisasi penelitiannya, penerapan dimensi transparansi belum optimal. Pada penelitian Sofyani, Pratolo, dan Saleh (2021) pada pemerintahan desa diketahui bahwa pemerintahan desa selalu memberikan laporan keuangan dan kinerja melalui berbagai media, antara lain website pemerintah desa, baliho dan lisan di acara-acara masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan teori Aman terkait dimensi transparansi karena pemerintah desa mampu menunjukkan kinerjanya kepada publik.

Dimensi pertanggungjawaban panti asuhan SR juga dapat dikatakan telah optimal, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya sistem hukuman juga dari pihak panti asuhan maupun yayasan terhadap pekerja yang melakukan tindakan yang salah, kemudian karena panti



asuhan telah berkomitmen untuk melayani dalam bidang anak – anak yang baru lahir maka mereka juga selalu membuatkan anak – anak akte lahir, panti asuhan selalu memberi yang terbaik bagi anak – anak maupun ibu hamil yang dirawat, kemudian terhadap pekerja yang baru masuk bekerja di panti asuhan selalu diberi surat perjanjian kerja sehingga pekerja panti asuhan selalu bekerja sesuai aturan, kemudian mempertanggungjawabkan setiap transaksi yang dilakukan contohnya ketika membeli bahan dapur atau bahan makan maka penanggungjawab yang melakukan transaksi akan menandatangani bukti belanja beserta nama terang agar bila ada kesalahan atau kecurangan nama yang ada di bukti belanja bisa mempertanggungjawabkannya, kemudian panti asuhan pun selalu membuat laporan keuangan bulanan dan selalu diserahkan kepada yayasan sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal tersebut sejalan Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013). Pada penelitian Yuliarti (2014) dimensi pertanggung jawaban ini dapat dikatakan belum optimal tetapi telah diterapkan yaitu dengan adanya laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan PSAK 45 hanya saja komponen yang ada tidak lengkap dan tidak ada Catatan Atas Laporan Keuangan yang disertakan. Pada penelitian Kristian (2013) hasil temuan tidak sesuai karena penerapan dimensi pertanggungjawabannya tidak optimal. Pada penelitian Sofyani, Pratolo, dan Saleh (2021) tidak diketahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban kinerjanya, tetapi karena pemerintah desa menerapkan transparansinya dengan baik maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawabannya juga telah diterapkan dengan baik.

Dimensi ketiga yaitu pengendalian panti asuhan SR dapat dikatakan optimal sesuai Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013) karena di dalam panti asuhan pengendalian cukup dilakukan dengan ketat sehingga tidak ada kecurangan, hal – hal yang dilakukan antara lain seperti pemisahan jabatan dan fungsi, terdapat evaluasi setiap akhir bulan atau setiap

triwulan, memasang CCTV, menyertakan salinan kwitansi pada laporan keuangan, dilakukan audit oleh yayasan, mengarsip salinan kwitansi penerimaan donasi,, dan rekening panti asuhan tidak boleh di atas nama kan pribadi. Dengan beberapa cara yang telah dilakukan panti asuhan tersebut tentu cukup untuk menjawab keraguan kita terhadap bagaimana pengendalian panti asuhan ini baik terhadap keuangannya maupun pelayanannya, hal ini telah sesuai dengan pertanyaan determinan yang disampaikan oleh Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013) yaitu organisasi telah melakukan apa yang diharapkan, tentunya diharapkan oleh pihak yayasan dan masyarakat atau donatur. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Yuliarti (2014). Panti asuhan yang menjadi obyek penelitiannya tidak diaudit laporan keuangannya. Bendahara diberi kepercayaan penuh untuk mengatur keuangan, dan jabatan yang ada di objek Yuliarti (2014) tidak berfungsi atau dengan kata lain hanya formalitas belaka. Ketidak sesuaian juga ada pada hasil temuan Kristian (2013), penerapan pengendaliannya kurang optimal. Tidak optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan antara Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di dalam penelitian Sofyani, Pratolo, dan Saleh (2021) diketahui bahwa pemerintah desa mengikutsertakan aktivis – aktivis masyarakat dalam menunjukkan rencana dan laporan keuangan yang akurat, hal tersebut artinya penerapan dimensi pengendalian telah dilakukan dengan baik serta sesuai dengan teori yang telah disampaikan oleh Aman.

Dimensi keempat yaitu tanggung jawab, pada penelitian ini hasil temuannya yaitu dapat dikatakan optimal sesuai Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013) antara lain seperti alasan panti asuhan menerima anak – anak untuk di asuh di panti asuhan, melakukan evaluasi tiap bulan atau triwulan, jenis pendanaan yang diterima oleh panti asuhan, melengkapi biodata, latar belakang anak asuh, dan tumbuh kembang seluruh anak asuh. Hal – hal yang dilakukan



oleh panti asuhan SR sesuai dengan aturan – aturan pemerintah yang berlaku bagi organisasi publik ataupun LKSA, artinya penerapan dimensi tanggung jawab panti asuhan SR telah sesuai dengan pertanyaan determinan dari Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013) yaitu bahwa organisasi telah mengikuti aturan yang berlaku. Ketidak sesuaian hasil temuan terdapat pada hasil penelitian Yuliarti (2014) karena melalui hasil temuannya dapat dikatakan bahwa penerapan dimensi tanggung jawab belum seluruhnya optimal, hal tersebut karena laporan keuangan yang dibuat tidak lengkap, kemudian juga tidak dijelaskan apakah anak – anak yang ada di panti asuhan memiliki akte lahir, kemudian apakah diberi pendidikan, ataupun memiliki jaminan kesehatan. Jika dibandingkan dengan hasil temuan penelitian Kristian (2013) juga dapat dikatakan tidak sesuai karena melalui hasil temuannya yaitu terdapat dua undang – undang terkait pengelolaan kehutanan, hal tersebut menyebabkan kebingungan bagi organisasi untuk menunjukkan tanggung jawabnya, artinya penerapan dimensi tanggung jawab pada undang – undang kehutanan belum optimal. Di dalam Penelitian Sofyani, Pratolo, dan Saleh (2021) diketahui bahwa pemerintah desa memberikan pendidikan kepada staff nya yang tidak memiliki pendidikan sarjana, hal ini merupakan salah satu contoh tanggung jawab pemerintah desa dalam pemenuhan standar yang berlaku bagi pemerintah desa.

Dimensi kelima ada dimensi responsivitas, pada panti asuhan SR dapat dikatakan bahwa penerapannya telah optimal. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil temuan antara lain yaitu memberikan pendidikan kepada anak – anak, menyediakan bidan bagi ibu hamil, menyediakan obat – obatan jika anak sakit, dan pemenuhan permintaan yayasan yaitu pelaporan setiap bulannya. Temuan ini sesuai dengan pertanyaan Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013) yaitu bahwa organisasi telah memenuhi harapan substantif yang disampaikan dalam bentuk kebutuhan dan

permintaan. Jika dibandingkan dengan hasil temuan Yuliarti (2014) juga terdapat kesesuaian antara lain mereka membuat laporan keuangan yang dibuat sesuai PSAK 45 yang diserahkan kepada yayasannya, kemudian penggunaan dana yang dimiliki digunakan untuk pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan modal kerja. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Kristian (2013) terdapat ketidak sesuaian karena pada hasil penelitian terhadap Bandung Culinary Night ditemukan bahwa terdapat tumpukan sampah yang menggunung sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan dimensi responsivitas belum ada. Hasil penelitian Sofyani, Pratolo, dan Saleh (2021) diketahui bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap transparansi pemerintah desa karena hak mereka terpenuhi, Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah desa telah menerapkan dimensi responsivitasnya dengan baik karena menyadari bahwa transparansi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta masyarakat. Hasil temuan tersebut sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Aman yaitu organisasi telah memberikan respon terhadap keinginan pihak – pihak yang berkepentingan.

Dari penjabaran hasil diskusi dapat diketahui bahwa panti asuhan telah menerapkan akuntabilitas sektor publik sesuai dengan pertanyaan kunci determinan dimensi akuntabilitas sektor publik menurut Aman, Al-Shbail, dan Mohammed sebagai berikut



| No. | Dimensi Akuntabilitas | Pertanyaan Kunci Determinan |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | Transparansi | Apakah organisasi mengungkapkan fakta-fakta tentang kinerjanya? |
| 2 | Pertanggung jawaban | Apakah organisasi menghadapi konsekuensi atas kinerjanya? |
| 3 | Pengendalian | Apakah organisasi melakukan apa yang diharapkan? |
| 4 | Tanggung jawab | Apakah organisasi mengikuti aturan yang berlaku? |
| 5 | Responsivitas | Apakah organisasi memenuhi harapan substantif yang disampaikan dalam bentuk kebutuhan dan permintaan? |

Gambar 1. Pertanyaan kunci determinan dimensi akuntabilitas sektor publik menurut Aman, Al-Shbail, dan Mohammed.

KESIMPULAN

Melalui hasil dan diskusi penelitian, peneliti menemukan beberapa inti melalui hasil interview, observasi tempat, dan analisis dokumen yang ada pada panti asuhan SR maka dapat disimpulkan Penerapan akuntabilitas horizontal dan vertikal sudah optimal. Penerapan lima dimensi akuntabilitas sektor publik telah diterapkan secara optimal dan sesuai dengan pertanyaan kunci determinan dimensi akuntabilitas sektor publik menurut Aman, Al-Shbail, dan Mohammed. Alasan diterapkannya akuntabilitas pada panti asuhan SR karena mereka merupakan badan organisasi yang memiliki yayasan, maka dari itu semuanya yang terjadi di panti asuhan harus di informasikan kepada yayasan. Alasan diterapkannya akuntabilitas pada panti asuhan SR karena mereka merupakan badan organisasi yang memiliki yayasan, maka dari itu semuanya yang terjadi di panti asuhan harus di informasikan kepada yayasan. Dampak dari penerapan akuntabilitas adalah mendapat kepercayaan dari masyarakat, membantu masyarakat yang mencari pekerjaan, dan eksistensi yang lama.

Kelebihan penelitian ini yaitu berfokus pada satu jenis organisasi dan tidak hanya membahas mengenai akuntabilitas horizontal

dan vertikal tetapi juga akuntabilitas sektor publik secara mendetail. Kekurangan dan keterbatasan peneliti antara lain pembahasan penelitian ini berfokus pada akuntabilitas sektor publik dan di panti asuhan sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk organisasi lainnya. Dengan keterbatasan dan kekurangan yang ada peneliti berharap dapat dilakukan penelitian lanjutan, penelitian lanjutan dapat dilakukan kepada organisasi sosial lainnya seperti lembaga swayada masyarakat, Palang Merah Indonesia, atau panti asuhan yang memiliki tanggung jawab pelaporan tetapi bukan kepada yayasan untuk mengetahui mengevaluasi penerapan akuntabilitas sektor publik yang telah di terapkan. Bentuk penelitian lanjutan lainnya juga dapat dilakukan kepada objek yang sama tetapi dengan metode yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisasmita dan Rahardjo, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu Yogyakarta.
- [2] Aman, A., T. A. Al-Shbail, dan Z. Mohammed. 2013. Enhancing Public Organization Accountability through E-Government System. International Journal of Conceptions on Management and Social Science, 1(1): 15-21.
- [3] Andayani Listyawati, (2010). Pelayanan Sosial Pelita Kasih terhadap Anak Terlantar, Media Informasi Penelitian



- Kesejahteraan Sosial, Volume 34 Nomor 3, Yogyakarta: B2P3KS.
- [4] Asrida. 2012. "Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran", Jurnal Kebangsaan 1 (1).
- [5] Atmadja, A. T. 2013. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- [6] Dwi Ristya Anggraini. 2013. Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII. Surabaya. , Vol 1, No 2, Agustus. ISSN : 2303-34IX (Diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 15:30).
- [7] Dwiyanto, A. 2014. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [8] Farida Ulfah, Ika, (2018) Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Panti Asuhan Al Maa'uun. Seminar Nasional dan Call For Paper III.
- [9] Hodges R, 2012, Joined-up government and the challenge to accounting and accountability researchers. *Financial Accountability and Management* 2012;28(1):26–51.
- [10] Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2010). Retrieved from <https://jdih.go.id/files/617/KEPMENSOS%2015A%20HUK%202010.pdf>
- [11] Klijn, E.H. New public management and governance: a comparison. In: Levi-Faur D, editor. *Oxford handbook of governance*. Oxford: Oxford University Press; 2012.
- [12] Lukito, Penny, Kusumastuti, 2014. Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi KeDepan. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- [13] Mahmudi. 2011, Akuntansi Sektor Publik. UII Press. Yogyakarta.
- [14] Mahmudi, 2013, Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- [15] Mursyidi. 2013, Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- [16] Norita Citra Yuliarti, 2014, Studi Penerapan PSAK 45 Yayasan Panti Asuhan Yabappenatim Jember. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember
- [17] Osborne, S. P. 2010. The introduction. The (New) Public Governance: a suitable case for treatment? In: Osborne SP, editor. *The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. London: Routledge.
- [18] Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Retrieved from <http://dit-keuangan.upi.edu/uploads/PSAK45ttgPelaporan-Kuangan-Organisasi-Nirlaba.pdf>
- [19] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2013). Retrieved from <https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/nspk-permensos-21-2013-pengasuhan-anak.pdf>
- [20] Reichard C. 2010. New public management. In: Anheier HK, Toepler St., editors. *International encyclopedia of civil society*. Berlin: Springer
- [21] Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2009). Retrieved from <http://www.bphn.go.id/data/documents/09pmsos108.pdf>
- [22] Shaoul J, Stafford A, Stapleton P. 2012. Accountability and corporate governance of public private partnerships. *Critical Perspectives on Accounting* 2012;23(3):213–29.
- [23] Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial



- Anak. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2011). Retrieved from <http://www.bphn.go.id/data/documents/11pmsos030.pdf>
- [24] Tjungadi, Marselinus A. H., Rahadian, Yan, 2020. Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada Gereja Toraja ABC.JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET), 12 (2), 241-264
- [25] Undang – Undang Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 5
- [26] Undang – Undang Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 62
- [27] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak
- [28] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan
- [29] AnakWicaksono, Kristian Widya , 2015. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik(JKAP), Vol 19 No 1
- [30] Winarsih, R. 2010. Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Jakarta: Pustaka Belajar.
- [31] Yuniarti, R. (2015). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 3(1).



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN